SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA POTORONO, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Oleh

JUNAIDI SOAMOLE

NIM : 13520198

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Junaidi Soamole

NIM : !3520198

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Judul : Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ini Saya Menyatakan Bahwa Skripsi ini Benar- benar Karya Saya Sendiri. Sepanjang Pengetahuan Saya Tidak Terdapat Karya Yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata Penulisan Karya Ilmiah Yang Lazim.

Yogyakarta, 10 April 2018

Yang Menyatakan

Junaidi Soamole

NIM. 13520198

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi initelahdipertahankan di depan Tim Penguji

UjianSkripsiJurusanIlmuPemerintahanSekolahTinggi Pembangunan MasyarakatDesa

"APMD" Yogyakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 03 April 2018

Tempat : RuangUjianSkripsi

STMPD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	**TandaTangan**
1. **Drs. TriyantoPurnomoRaharjo, BE, M.Si** **KetuaPembimbing**	.....
2. **Drs. Hastowiyono, MS** **Penguji 1**	.....
3. **Ir. Nelly Tiurmida, MPA** **Penguji 2**	.....

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, MA

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDESA POTORONO ,KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DiajukanUntukMemenuhiSyaratGunaMencapaiDerajarKesarjanaanjenjang (S-1)

Program StudiIlmuPemerintahan

DisusunOleh

JUNAIDI SOAMOLE

13520198

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

MOTTO

BerlombaLombaDalam Hal Kebaikan,
JadilahPemenangdalamPerlombaanMenujuKebaikandanketaatankepada ALLAH. Dan janganlahPernahBerlomba-lombadalamurusanduniasebabduniahamyalahsementaradanakhiratselamanya.Firman Allah dalamsurat Al Baqarah:148

SesungguhnyaSesudahKesulitanItuPastiadakemudahan,
sesungguhnyasesudahkesulitanitupastiadakemudahan. Firman Allah DalamSuratAsysyarhayat 5-6.

PERSEMBAHAN

Karyailmiahinikupersembahkanuntuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercintadantersayang, Bapa Djamal Soamole danIbuYatmiMamulati, yang suda bersusah payah membesarkan, merawat, membina dan mendidik sertatak bosan-bosanya berdo'a untuk keberhasilnku ini.

2. Kaka Kartini,subhan,mahyudin,sukarni,bojedanjakia yang tercintadantersayang yang selamamerawatdanmenjagasayadiwaktukecil, danselalumendukungdidalampendidikanku

3. Ponakan-ponakanku yang yangtercintadantersayang yang tidakbisadisebutkansatupersatu, kalianlah yang menjadipenyemangatku.

4. Cha ida Yang selaluMemberikanMotivasi, SehinggaSayadapatmenyelesaikanSkripsiini

5. Sahabatku, Baster, Boym, Zidane, Mas Eko, Bandi, Randi Kalianlahsahabatterbaikdanterhebat

6. Teman-Teman GMNI STPMD" APMD"Yogyakarta.

7. Teman-Teman HKMKBS Yogyakarta.

8. Teman –Teman KKN Yang tercinta. Mas Dihan, Afif, Agus, danmba Mei

9. Teman-TemanRestuKost Yang selaluMembuatHari-hariLebihBersemangat

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah meberikan anugrahNYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang stara (S-1) judul dalam skripsi adalah PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRKTUR (penelitian deskriptif kualitatif di Desa Ptorono, kecamatan banguntapan, kabupaten Bantul, DIY)

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimaksih kepada.

1. Bapak Drs, Habib Muhsin, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"Yogyakarta.

2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP.MA selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan

3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo.BE.M.si selaku dosen pembibing

4. Bapak Drs. Hastowiyono, MS Selaku Dosen Penguji I
5. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA Selaku Dosen Penguji II

6. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Yang Telah, memberikan Ilmu Pengetahuan Selama Penulis Belajar

7. Bapak Gubernur DIY yang telah memberikan Izin Penelitian

8. Bapak Purwata Selaku Lurah Desa Potorono

9. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

   Namun demikian Penulis Yakin tidak semua langkah akan terlepas dari kesalahan dan kekurangan, justru di setiap sudut sudut, kegiatan terdapat deretan- deretan rintangan dan hambatan yang mengaitkan.

   Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf serta tidak menuntup kemungkinan adanya saran, pendapat dan kritik membangun dari semua pihak demi untuk menyempurnakan skripsi ini.

   Harapan penulis, betapapun kecilnya karya ini, semoga dapat memberikan arti dan manfaat bagi semua yang membacanya.

Yogyakarta. 09 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…… i

HALAMAN PENGESAHAN…… ii

HALAMAN MOTO…… iii

HALAMAN PERSEMBAHAN…… iv

KATA PENGANTAR…… v

DAFTAR ISI……..……... vi

DAFTAR TABEL…… viii

SINOPSIS…… ix

BAB I. PENDAHULUAN……. 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH…… 1
B. RUMUSAN MASALAH …… 8
C. TUJUAN PENELITIAN ……. 8
D. MANFAAT PENELITIAN…….. 8
E. KERANGKA TEORI …….. 9
1. Peranan……... 9
2. PemerintahDesa……. 13
3. Pembangunan infrastruktur…… 23
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN……. 32
G. METODE PENELITIAN……. 33
1. Jenispenelitian……... 33
2. Unit analisis……... 33
3. Teknikpengmpulandata ……... 33
a. Wawancara ……. 34
b. Observasi……. 34
c. Dokumentasi ……... 34
4. Teknikanalisis data …….. 35

PROFIL DESA POTORONO……. 37

A. SejarahDesa……... 37

B. GoegrafiDesa……..38

C. DemografiDesa……. 40

D. TopografiDesa…….. 44

E. KeadaanPendidikan, Ekonomi, Sosial, danBudaya…….. 45

F. StrukturOrganisasidan Tata KerjaPemerintahanDesa……. 54

ANALISIS DATA…… 56

A. DeskripsiInforman…… 56

B. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur……. 57

C. PengorganisaianPembanugunaninfrastruktur……. 61

D. Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur……. 63

E. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur…….. 66

PENUTUP……. 71

A. Kesimpulan…… 71

B. Saran…….. 73

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PetaDesaPotorono …… 40

Tabel 2. Data DesaBerdasarkanJumlahPenduduk…… 42

Tabel 3. Data DesaBerdasarkanJenisKelamin…… 44

Tabel 4. Data DesaBerdasarkanKelompokUmur…… 45

Tabel 5. Data DesaPotoronoBedasarkanPendidikan…… 48

Tabel 6. Data DesaBerdasarkanmatapencaharian…… 49

Tabel 7. Data DesaBerdasarkan Agama…… 53

Tabel 8. Data DesaBerdasarkan KK MiskinMenurutWilyahPedukuhan…… 55

INTISARI

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Potorono dalam pembangunan infrastruktur adalah yang *pertama* dari segi Dana, Dana Desa yang tidak terlalu besar Namun Masyarakat ingin semua wilyahnya dibangun, yang *kedua* faktor SDM, (sumber Daya Manusia). Pamong Desa Potorono Kebanyakan masih minim pengalaman, Desa Potorono membutuhkan pamong yang professional dan mampu bekerja secara maksimal, dan yang *ketiga* Kurangnya peranan pemerintah terutama pemerintah Desa Potorono Banguntapan Bantul dalam memberdayakan mayarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa yaitu tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa, Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti Peran Pemerintah di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis penelitian kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa, Perangka tDesa, Ketua BPD dan Masyarakat, Teknik Penentuan Informan Menggunakan Teknik Purposive, Teknik Pengumpulan data dalam penelitian iniadalah Observasi, wawancara, Dokumentasi,TeknikAnalisis Data

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari data yang didapat, baik primer maupun sekunder, maka dapat dilihat Peran Pemerintah Desa Potorono dalam pembangunan Infrastruktur, dengan Ruang Lingkup sebagai berikut, *yang Pertama* Perencanaan Pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Ada Dalam RPJMDES dan Masyarakat dilibatkan dalam Perencanaan, *kedua* Pengorganisasian Pemerintah Desa Potorono Membentuk tim Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastrktur, *ketiga* Pembangunan Infrastruktur suda ada yang terlaksana dan ada yang belum terlaksana, *keempat* Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Potorono ada tim dari kabupaten yang mengawasi, *kelima* faktor penghambat adalah turunya Dana Desa yang terlambat.

Kata Kunci :Peran Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur, Desa Potorono.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi. Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal periode pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelengaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Dalam otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang desa sebagai dasar hukum

yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi desa. Desa juga secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil. desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota, tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat merupakan desa adat atau yang disebut dengan nama lain (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016).

Idealnya pembangunan desa memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelengarakan rumah tangganya sendiri. Idealnya pembangunan desa dimana masyarakat dapat hidup dengan tenang tanpa ada rasa ketakutan baik karena adanya tindakan kriminal maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja dengan baik, normal dan wajar. Keadaan yang sehat, sejuk bersih dan menyenangkan karena didukung oleh suasana lingkungan sosial yang kondusif dan lingkungan fisik yang sehat dan bersih dan masyarakat yang memiliki kemajemukan suku dan agama dapat hidup berdampingan, saling menghormati, menghargai serta memiliki sifat toleran terhadap warga lainnya yang berbeda baik suku maupun keyakinan.

Pemerintah daerah telah mengakui adanya kewenangan. yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, saat ini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom up*, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilisator dan motivator. Hal ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan, kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemisknan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh subtansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusahan memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang

demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah *(grasroots)*, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun

kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Dahlan, dkk., 2012:44).

Dalam pembangunan **infrastruktur desa** harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005: 61). Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi (Stone dalam Kodoatie 2005:101). Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik saran

pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif (Rosalina, 2013:110).

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, **peran dan prakarsa pemerintah** (desa) masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan Desa.

Hasil studi pendahuluan peneliti di Desa Potorono Banguntapan Bantul diketahui bahwa dalam pelaksanan pembangunan infrastruktur masih terdapat masalah atau masih terdapat kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu Dana Desanya Kecil Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah atau masyarakat yang kurang respon. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Banguntapan Bantul sangat ditentukan oleh kerjasama, koordinasi dan sinergisitas yang solid dan saling menguatkan antara pemerintah desa, kecamatan, pemerintah

kabupaten (SKPD), DPRD, bahkan peran partisipatif pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), praktisi dan akademisi serta paraswa stawan, kerjasama, koordinasi, sinergisitas, dan partisipasi masyarakat desa. Hal ini dilakukan baik mulai dari proses perancanaan melalui mekanisme forum perancanaan partisipatif pembangunan desa, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan yang didasarkan pada prinsip; semangat dan inisiatif membangun datang dari masyarakat desa, desa bebas menyusun perencaanaan Pembangunan desanya, penguatan dan pemanfatan potensi dan kearifan lokal, terbangunnya desa-desa sesuai karakteristik potensi dan kearifan lokalnya, dan terwujudnya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) atau dari dana desa.

Kurangnya peranan pemerintah terutama pemerintah Desa Potorono Banguntapan Bantul dalam memberdayakan mayarakat bidang pembangunan infrastruktur desa yaitu tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut yaitu tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa, dimana yang mengerjakan proyek pembangunan di desa tersebut adalah pemborong yang berasal dari daerah lain, dan hal ini diperoleh dari hasil pra-penelitian dengan melakukan wawancara terhadap beberapa warga dilokasi penelitian. Sikap pemerintah desa yang tidak pedduli terhadap masyarakat dalam pembangunan desa akan mematikan tradisi gotong-royong masyarakat desa dan menjadikan masyarakat merasa tidak ikut memiliki dalam

pembangunan yang dilakukan sehingga kemungkinan pembangunan tersebut akan cepat rusak karena tidak ada rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji Dana Desa, Parisipasi Masyarakat Dan Pembangunan Infastruktur di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Banguntapan Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Banguntapan Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk Mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah istimewa YogyakartaS

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2006, Pembangunan PedesaandanPerkotaan, GrahaI lmu Yogyakarta.

Cohen, Bruce. J. 1992.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta Rineka Cipta.

Dahlan, Indrasto Wahyudi, Anwar Parawangi, dan Amir Muhiddin. 2012. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*.Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.

Fattah, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan DewanSekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Jazuli, M. 2001. Paradigm SeniPertunjukan, Yogyakarta :YayasanLentera

Juliantara, Dadang, 2005 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Yogyakarta, Pembaruan

Ketaren, S. 2008. MinyakdanLemakPangan.CetakanPertama. Jakarta :Universitas Indonesia Press.

Korten , David. 2002, Menuju Abad ke – 21 :TindakanSukareladan Agenda Global,YayasanObor Indonesia Jakarta.

Ketaren, S. 2008. Minyakdan Lemak Pangan.Cetakan Pertama. Jakarta Universitas Indonesia Press.

Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengaturan Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Koetnjoroningrat,1986, Metode Penelitian Masyarakat Jakarta. Gramedia

Moleong, Lexy. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyasa, (2002), ManejemenBerbasisSekolah, Konsep Strategi dan Implementasi,RemajaRosdakarya, Bandung

Nawawi, Hadiri, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Wali Pers.

Panglaykim, , 1981 Manajemen Suatu Pengantar.,Jakarta Ghalia Indonesia

Rosalina, Maya. 2013**.** Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *eJournal Pemerintahan Integratif.* 1 (1): 106-120.

Ruslan, Rosady, 2004, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudiono,2015,Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa Di Desa Kalibototo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo

Sri Wiludjeng S.P, 2007. Pengantar Manajemen, Graha Ilmu Yogyakarta.

Sedarmayanti. 2007. *Perilaku Peranan*. Bandung. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suriadi, 2005.Perancangan dan Implementasi Modul Kontrol Bandung Alfabet

Soekanto, Soeryono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta Penerbit Djambatan.

Taneko, soleman B, 1986, konsepsi system sosialdan system social Indonesia.jakarta fajar agung.

Wirutomo, Paulus. 1981. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi Jakara Rajawali Press.

UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016

https://www.suryaden.com/forum-desa-nusantara/pp-43-tahun-2014-tentang-

peraturan-pelaksanaan-uu-desa